



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG



**BISA**  
Berintegritas, Inovatif,  
Santun, Akuntabel

**bangga**  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Sumbagai, Berprestasi  
Harmonis, Loyal, Adab, Berkeadilan

# LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUN 2025 (AUDITED)

## CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CALBMN)



## CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

### I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Agama Bontang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun



LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Bontang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

#### A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang



Bagan Akun Standar;

- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian



Barang Milik Negara;

- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 33) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;



- 34) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 35) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 36) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

## **B. Entitas Pelaporan**

Pengadilan Agama Bontang selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

## **C. Periode Pelaporan**

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

## **II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif



dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

#### **A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi**

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodifikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam



Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.



## B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Agama Bontang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.



Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

### C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.



#### D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Agama Bontang, dalam LBKP Tahun 2025 (*Audited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik



Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

#### **E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN**

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**.

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **F. Kebijakan Pelaporan BMN**

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro



Perengkapan Nomor ... Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Audited).**

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Bontang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini adalah sebesar Rp.11.872.423.485 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp.11.171.087.885 (sebelas miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp.26.619.200.766 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp.12.660.268.183 (dua belas miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp.11.958.932.583 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas



BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

#### **IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

##### **A. Saldo Awal**

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Agama Bontang adalah sebesar Rp.11.171.087.885 (sebelas miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas nilai



BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp.11.136.660.535 (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.34.427.350 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

## B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 (nol rupiah) Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
-	-	-	-

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp.0; yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp.0 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp.0 (nol rupiah).

### 2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Botang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.2.042.519.548 (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 4,675 m<sup>2</sup>



dengan nilai sebesar Rp. 2.042.519.548 (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp.1.392.591.548 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp.1.392.591.548 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	1.392.591.548

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	1.392.591.548

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 60 m<sup>2</sup> bidang dengan nilai sebesar Rp.19.867.500 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Baik	4,675	2.042.519.548



Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

Terdapat Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang ditatausahakan oleh satuan kerja dengan luas 60 m<sup>2</sup> dan nilai perolehan sebesar Rp19.867.500 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan BMN, tanah tersebut telah disewakan kepada pihak ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pelaksanaan sewa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.

### 3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 499 buah dengan nilai sebesar Rp.3.707.296.828 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 512 buah dengan nilai sebesar Rp.3.005.961.228 (tiga miliar lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) mutasi tambah sebanyak 55 buah dengan nilai sebesar Rp.6.757.610.003 (enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tiga rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 68 buah dengan nilai sebesar Rp.6,056.274.403 (enam miliar lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).



Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 6 buah dengan nilai sebesar Rp.343.016.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp.368.766.000. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.25.750.000.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Pengguna	25.750.000	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 buah dengan nilai sebesar Rp.25.750.000.



Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	6	343.016.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp.1.118.932.003. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp.605.170.003. mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp.1.184.524.003. dan mutasi kurang sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp.670.762.003.

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Hibah Masuk	1.184.524.003	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



Koreksi Pencatatan	670.762.003	-
--------------------	-------------	---

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, Saldo Alat Angkutan statusnya Koreksi Pencatatan operasional pemerintah adalah 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 670.762.003.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	10	1.118.932.003
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



-	-	-
---	---	---

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 13. Kondisi Alat Bengkel dan Alat Ukur

d. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.2.500.000. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai



sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.2.500.000.

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Pertanian

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	2.500.000	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Pertanian

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 buah dengan nilai sebesar Rp.2.500.000.

Rincian data Alat Pertanian berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Alat Pertanian



e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 362 buah dengan nilai sebesar Rp.1.065.061.355. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 370 buah dengan nilai sebesar Rp.818.506.355. mutasi tambah sebanyak 46 buah dengan nilai sebesar Rp.5.537.136.000. dan mutasi kurang sebanyak 57 buah dengan nilai sebesar Rp.5.347.288.500.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	149.969.000	-
Hibah Masuk	6.399.000	7.440.000
Koreksi Pencatatan	5.737.328.000	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	10.875.000	3.166.000
Koreksi Pencatatan	5.347.288.500	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 56 buah dengan nilai sebesar Rp. 10.875.000. dan Koreksi Pencatatan adalah 1 buah dengan nilai sebesar RP5.347.288.500.



Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	362	1.065.061.355
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 19. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 65 buah dengan nilai sebesar Rp.517.415.560. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 59 buah dengan nilai sebesar Rp.526.689.460. mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.700.000. dan mutasi kurang sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp.9.973.900.

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	700.000

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar



Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	9.973.900	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 8 buah dengan nilai sebesar Rp.9.973.900.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	65	517.415.560
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 22. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp.30.551.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp.29.519.000. mutasi tambah sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp.960.000. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0



Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Hibah Masuk	-	960.000

Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	9.973.900	-

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	10	30.551.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Alat Kedokteran dan Kesehatan

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah



dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Alat Laboratorium

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Alat Laboratorium

Rincian data Alat Laboratorium berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 28. Kondisi Alat Laboratorium



i. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Alat Persenjataan

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Alat Persenjataan

Rincian data Alat Persenjataan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-



Tabel 31. Kondisi Alat Persenjataan

## j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 48 buah dengan nilai sebesar Rp.637.570.910. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 45 buah dengan nilai sebesar Rp.603.280.910. mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp.34.290.000. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Masuk	34.290.000	-

Tabel 32. Rincian Mutasi Tambah Komputer

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 33. Rincian Mutasi Kurang Komputer

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	48	637.570.910



Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 34. Kondisi Komputer

## k. Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah Alat Eksplorasi

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 36. Rincian Mutasi Kurang Alat Eksplorasi

Rincian data Alat Eksplorasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-



Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 37. Kondisi Komputer

i. Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 38. Rincian Mutasi Tambah Alat Pengeboran

Mutasi Kurang Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 39. Rincian Mutasi Kurang Alat Pengeboran

Rincian data Alat Pengeboran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing)	Nilai (Rp)
----------------	--	---------------



	barang)	
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 40. Kondisi Alat Pengeboran

## m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)apa

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 41. Rincian Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 42. Rincian Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Rincian data Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 43. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

## n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 44. Rincian Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi



Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 45. Rincian Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi

Rincian data Alat Bantu Eksplorasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 45. Alat Bantu Eksplorasi

o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



-	-	-
---	---	---

Tabel 46. Rincian Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 47. Rincian Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja

Rincian data Alat Keselamatan Kerja berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 48. Alat Keselamatan Kerja

p. Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan



nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 49. Rincian Mutasi Tambah Alat Peraga

Mutasi Kurang Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 50. Rincian Mutasi Kurang Alat Peraga

Rincian data Alat Peraga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 51. Alat Peraga



q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 52. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 53. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi

Rincian data Peralatan Proses/Produksi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-



Rusak Berat	-	-
-------------	---	---

Tabel 54. Peralatan Proses/Produksi

## r. Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 55. Rincian Mutasi Tambah Rambu-Rambu

Mutasi Kurang Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 56. Rincian Mutasi Kurang Rambu-Rambu

Rincian data Rambu-Rambu berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing barang)	Nilai (Rp)
Baik	-	-



Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 57. Rambu-Rambu

## s. Peralatan Olahraga (3.19)

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Mutasi Tambah Peralatan Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 58. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Olahraga

Mutasi Kurang Peralatan Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 59. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Olahraga

Rincian data Peralatan Olahraga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan)	Nilai (Rp)
----------------	-------------------------------------	---------------



	masing-masing barang)	
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 60. Peralatan Olahraga

### Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.368.033.785 (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp3.955.438.069 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp6.792.600.

### Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

### 4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp5.665.137.120 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah). dan mutasi kurang sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar



Rp5.665.137.120 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp7.559.595.120. mutasi tambah sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp5.665.137.120. dan mutasi kurang sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp5.665.137.120.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	5.665.137.120	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	5.665.137.120	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah/ nilai Bangunan di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 60 m<sup>2</sup> bidang dengan nilai sebesar Rp.19.867.500 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedang dalam proses dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai



berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	11	5.665.137.120
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

### Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 Rp7.559.595.120 (tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp5.665.137.120 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0.

### Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan (jika ada)

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

### 5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0 (nol). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.



Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:  
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

### **Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan**

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0. (nol) Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp.0. dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp.0.

### **Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan**

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.



## 6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665 Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665. (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0 (nol) Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp12.770.665 mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. dan mutasi kurang sebanyak 119 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

### 7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. (nol) Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. (nol) mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. (nol) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp.0. (nol).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan



## 8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0 (nol).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

### a. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

#### 1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.950.000. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Saldo Software (8.01.01) yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp4.950.000 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

### Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang



Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar sebesar Rp0. (nol).

**b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan**

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. (nol), Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.0 (nol), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0. (nol) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp.0. (.nol)

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	54.828.900	2.683.500
3. Gedung dan Bangunan	-	-
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp856.934.125 (delapan ratus limah puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp0 (nol) menjadi Rp856.934.125 (delapan ratus limah puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah)

#### **c. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol).Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol).nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol).dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0.

### **9. Aset Bersejarah**

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 adalah Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

## **C. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025**

### **1. BMN per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0. (nol) nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>I</b>	<b>Aset Lancar</b>						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Aset Tetap</b>						
1	Tanah	36.743.497.000	74%	-	-	36.743.497.000	74%
2	Peralatan dan Mesin	4.357.572.785	8,7	10.461.500	0,2%	4.368.034.285	8,9%
3	Gedung dan Bangunan	7.559.595.120	16%	-	-	7.559.595.120	16%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	12.770.665	0,03%	3.745.000	0,007%	12.770.665	0,037%
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>48.673.435.570</b>	<b>98,73%</b>	<b>14.206.500</b>	<b>0,207%</b>	<b>48.683.897.076</b>	<b>98,93%</b>
<b>III</b>	<b>Aset Lainnya</b>						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	4.950.000	0,0009%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	853.189.125	0,8%	3.745.000	0,007%	856.934.125	0,8%
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>853.189.125</b>	<b>0,8%</b>	<b>3.745.000</b>	<b>0,007%</b>	<b>861.884.125</b>	<b>0,8%</b>
	<b>Total</b>	<b>49.526.624.695</b>	<b>98,8%</b>	<b>17.951.500</b>	<b>0,214%</b>	<b>49.540.831.195</b>	<b>100%</b>

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:



No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>I</b>	<b>Aset Lancar</b>						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Aset Tetap</b>						
1	Tanah	36.743.49 7.000	85,1%	-	-	36.743.49 7.000	85,1%
2	Peralatan dan Mesin	402.134.7 16	0,93%	3.668.900	0,008%	405.803.6 16	0,938%
3	Gedung dan Bangunan	5.975.673 .354	13,8%	-	-	5.975.673. 354	13,8%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	12.770.66 5	0,02%	-	-	12.770.66 5	0,02%
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	43.134.07 5.735	<b>99,85%</b>	<b>3.668.900</b>	<b>0,008%</b>	<b>43.137.74 4.635</b>	<b>99,98%</b>
<b>III</b>	<b>Aset Lainnya</b>						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	4.950.000	0,01%	4.950.000	0,01%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-	-	360.000	0,0008%	360.000	0,0008%
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.310.000</b>	<b>0,0108%</b>	<b>5.310.000</b>	<b>0,0108%</b>
	<b>Total</b>	<b>43.134.0 75.735</b>	<b>99,85%</b>	<b>8.978.900</b>	<b>0,13%%</b>	<b>43.143.0 54.635</b>	<b>100%</b>

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

## 2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (**Nama Satker**) Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:



No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
<b>I</b>	<b>Aset Lancar</b>	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
<b>II</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>48.671.126.405</b>	<b>48.671.126.405</b>	<b>0</b>
1	Tanah	36.743.497.000	36.743.497.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.368.034.285	4.368.034.285	0
3	Gedung dan Bangunan	7.559.595.120	7.559.595.120	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
<b>III</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>
1	Aset Tak Berwujud	4.950.000	4.950.000	0
2	Aset Lain-Lain *)	-	-	-
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
<b>Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)</b>		<b>48.676.076.405</b>	<b>48.676.076.405</b>	<b>0</b>

\*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 1 Periode periode laporan terakhir (*Audited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan <i>Audited</i> 2025	11.872.351.485	-	-

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Agama Bontang per Periode Laporan *Audited*

### B. Informasi Pengelolaan BMN

#### 1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	2	2.042.591.548
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	10	1.118.932.003
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	431	1.588.364.825
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	76	1.000.000.000
5	Alat Berat	-	-	-	-
6	Bangunan Gedung	-	-	6	5.264.326.000
7	Rumah Negara	-	-	2	854.782.000
8	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
9	Instalasi dan	-	-	-	-



	Jaringan				
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-
11	Aset Tetap lainnya	-	-	28	3.427.109
12	Aset Tak Berwujud	-	-	1	4.950.000
<b>JUMLAH</b>		-	-	556	<b>10.756.374.603</b>

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025





	oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025

### 3. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025

### C. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

#### 1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola**



**Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 (*Audited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0. sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

#### D. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain.

#### E. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Agama Bontang, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain.

#### F. Pengungkapan Penting Lainnya

##### 1. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	-	-	-	-

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang

##### 2. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah



Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

**VI. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024**

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKPP Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Agama Bontang.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG



**BISA**  
Berintegritas, Inovatif,  
Santun, Akuntabel

**bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Santun, Amanah,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Inovatif

# LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUN 2025 (AUDITED)

## GAMBARAN UMUM TERKAIT PENGELOLAAN BMN



## GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bontang selama tahun 2025.

- a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara  
Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan/ Pengadaan	Kendaraan	Disetujui
2	Pemeliharaan Mesin	Tik dan Non Tik	Disetujui
3	Pemeliharaan Gedung	Gedung Kantor	Disetujui

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 3 usulan dan tidak disetujui sebanyak 0 usulan

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bontang yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 556 unit dengan nilai sebesar Rp10.756.374.603.

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	-	-	2	2.042.591.548	2	2.042.591.548
Alat Angkutan Bermotor	-	-	10	1.118.932.003	10	1.118.932.003
Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	431	1.588.364.825	431	1.588.364.825
Peralatan dan Mesin TIK	-	-	76	1.000.000.000	76	1.000.000.000
Alat Berat	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	-	-	6	5.264.326.000	6	5.264.326.000
Rumah Negara	-	-	2	854.782.000	2	854.782.000
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-	...	...
Aset Tetap lainnya	-	-	28	3.427.109	...	...
Aset Tak Berwujud	-	-	1.779	76.071.088.032	1	4.950.000
<b>Total</b>	-	-	1	4.950.000	556	<b>10.756.374.603</b>



c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Agama Bontang telah melakukan permohonan terkait ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Agama Bontang per 31 Desember 2025 tidak terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan.

“Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.”

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Agama Bontang per 31 Desember 2025 tidak terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN.

“Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.”

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Agama Bontang telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang

Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 Pengadilan Agama Bontang telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG



**BISA**  
Berintegritas, Inovatif,  
Santun, Akuntabel

**bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Santun, Empatik,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kreatif

# LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUN 2025 (AUDITED)

## LAMPIRAN PENJELASAN BMN

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

00501160065208000KD - PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Kode Satker	SatkerName	TelaahStatus	Deskripsi Transaksi	Id	Kode Kementerian	Kode Eselon	Kode Wilayah	Kdsatker	Nama Satker	Wil	Kdtrx	Nilai	Thang	Penjelasan
1	00501160065208000KD	PENGADILAN AGAMA BON	Telaah Ada Penjelasan	Software	652080.162151.2025	005	01	1600	652080	PENGADILAN AGAMA BONTA	162151	4950000	2025	Hibah	
2	00501160065208000KD	PENGADILAN AGAMA BON	Telaah Ada Penjelasan	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	652080.391116.2025	005	01	1600	652080	PENGADILAN AGAMA BONTA	391116	36697286	2025	Merupakan akumulasi penyusutan atas transaksi hibah masuk terhadap aset berupa mobil yang sedang dalam proses pengesahan	

